

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN SISTEM PENDUKUNG DPR RI

Achmad Djuned, SH, MH

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Sistem Pendukung, pada dasarnya terangkum dalam empat permasalahan besar, yang dapat dilihat dengan pendekatan elemen organisasi (4M), yaitu:

- *Man* (SDM/pegawai);
- *Method* (kelembagaan/ketatalaksanaan/cara kerja);
- *Money* (anggaran); dan,
- *Material* (sarana dan prasarana).

Permasalahan SDM

- Dari sisi kuantitas, SDM masih didominasi oleh dukungan administrasi dan teknis (dukungan keahlian yang masih belum ideal/baru mencapai $\pm 10\%$ dari total pegawai);
- Dari jumlah masih kurang jika dikaitkan dengan hasil Analisis Beban Kerja, yaitu terdapat kekurangan pegawai di Setjen DPR-RI baik untuk administrasi maupun keahlian (tenaga fungsional);
- Dari sisi kualitas, berdasarkan hasil asesmen yang pernah dilakukan mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan;
- Dilihat dari etos kerja masih ada pegawai yang memiliki etos kerja yang rendah. Ini dicerminkan dengan perilaku “yang penting datang dan absen”; dan,
- Dilihat dari perilaku, masih ada fenomena moral *hazard*, di mana masih ada pegawai yang memanfaatkan kedekatan dengan figur otoritas (Pimpinan/Anggota DPR RI) untuk kepentingan karirnya (untuk kepentingan promosi, mutasi, termasuk tidak mau dimutasi).

Permasalahan Kelembagaan/ Ketatalaksanaan/Cara Kerja

- Masih banyak PP, Permen yang belum ditindaklanjuti dalam pengaturan internal;
- Struktur organisasi yang terus berubah. Saat ini dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU No.42/2014) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU No.17/2014) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan telah ditindaklanjuti dengan Perpres No.27 Tahun 2015 yang mengamanatkan pembentukan Badan Keahlian DPR dan Inspektorat Utama. Hal ini akan mereduksi sebagian dari tugas dan fungsi Setjen DPR RI sehingga struktur organisasi harus dirubah;
- Meskipun sudah ada SOP, tapi koordinasi masih sering tidak jalan, begitu juga;
- Masih banyak SOP yang belum disusun (SOP yang sudah disusun per Juli 2014 adalah sebanyak 624 dari target identifikasi 1.222 SOP); dan,
- Belum ada evaluasi SOP (apakah SOP yang sudah ditetapkan berfungsi? Apakah efektif? Dsb).

Permasalahan Anggaran

- Meskipun sudah meraih Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi tren daya serap anggaran masih rendah. Dimana untuk kurun waktu 2005-2014 realisasi berkisar 70%-85%.
- Hal ini memperlihatkan bahwa masih ada masalah dalam hal perencanaan anggaran. Meskipun perencanaan anggaran sudah berbasis kinerja tetapi dalam prakteknya masih mengacu kepada pagu (*line item budgeting*), sehingga tidak heran di dalam pelaksanaannya sering kali DIPA direvisi);
- Permasalahan anggaran lainnya adalah sering kali bocor ke media, meskipun anggaran tersebut belum disetujui, termasuk kebocoran dalam proses lelang.
- Aspek akuntabilitas kinerja saat ini menjadi ukuran untuk menilai atau menjadi standar "*benchmark*" untuk mengukur dan membandingkan kinerja antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah yang lainnya. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Setjen DPR-RI telah menjadi instansi yang dinilai sejak tahun 2009.
 1. Pada tahun 2009, kinerja Setjen DPR-RI mendapat nilai "D".
 2. Pada tahun 2010 kinerja Setjen meningkat menjadi "C".
 3. Pada tahun 2011 meningkat menjadi "CC".
 4. Pada tahun 2012 tetap "CC" tetapi nilai skornya meningkat (padahal target tahun 2012 "B")
 5. Pada tahun 2013 meningkat menjadi "CCC" (padahal target tahun 2013 "A").

Sarana dan Prasarana

- Dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana maka kebutuhan infrastruktur terus meningkat tapi tidak didukung dengan pembangunan yang signifikan;
- Masalah infrastruktur menghadapi:
 - Kekurangan infrastruktur bangunan fisik yang representatif untuk kebutuhan DPR RI maupun Sistem Pendukung DPR RI tetapi sulit untuk direalisasikan karena sering mendapatkan respon negatif dari publik (resistensi publik); dan,
 - Tidak adanya *database* infrastruktur sehingga perencanaan pemeliharaan selalu mendapat kritik di BURT karena kekurangan data pendukung (seolah-olah anggaran mengada-ada).
- Masalah Pengamanan Dalam menghadapi:
 - Masalah kultural yaitu sifat yang ada pada sebagian anggota, karyawan, tamu maupun pengunjung yang tidak ingin diatur serta masih rendahnya disiplin;
 - Luasnya area yang harus menjadi target pengamanan yaitu ± 60 ha;
 - Penataan kawasan yang belum terintegrasi, misalnya saja terdapat 64 pintu sehingga pengamanan menjadi kurang optimal;
 - Belum adanya tempat pengunjuk rasa sehingga pengunjuk rasa cenderung berpotensi untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan;
 - Adanya lembaga lain dalam satu kompleks kawasan sehingga dapat memunculkan ego sektoral dan berdampak pada rendahnya koordinasi; dan,
 - Adanya persepsi masyarakat yang menganggap Gedung DPR RI adalah gedung rakyat sehingga masyarakat menganggap bebas untuk memasuki kawasan Gedung DPR RI.

TANTANGAN KE DEPAN

Sistem Pendukung DPR RI saat ini menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang dihadapi tersebut pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua tantangan besar, yaitu:

1. Tantangan yang melekat pada DPR RI (tantangan yang dihadapi oleh DPR RI yang berimbas kepada Sistem Pendukung DPR RI); dan,
2. Tantangan yang melekat kepada Sistem Pendukung DPR RI sebagai sebuah organisasi pendukung DPR RI.

Tantangan yang melekat pada tantangan yang dihadapi oleh DPR RI, diantaranya adalah:

1. Perubahan Sistem Ketatanegaraan RI.

Secara konstitusional kedudukan antara DPR RI dan Pemerintah telah mencerminkan keseimbangan/kesetaraan. Pengaruh pemisahan kekuasaan bagi DPR RI juga membawa konsekuensi tuntutan terhadap kinerja DPR RI yang seimbang, dalam arti mampu mengimbangi kapasitas Pemerintah melalui mekanisme *check and balances*. Untuk itu, DPR RI dituntut melakukan penguatan kelembagaan pada aspek kedewanan. Keterkaitan dengan Sistem Pendukung DPR RI adalah:

1) Sistem Pendukung DPR RI harus memberikan penguatan:

- a) Aspek efisiensi dan efektifitas pada dukungan administrasi;
- b) Aspek kecepatan pelayanan pada dukungan teknis;
- c) Aspek ketepatan (akurasi) pada dukungan keahlian; dan,

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pendukung.

2. Citra DPR RI yang kurang positif.

Keterkaitan dengan Sistem Pendukung DPR RI adalah :

1) Setjen DPR RI harus mendukung proses transparansi dan keterbukaan kepada publik dengan membenahi tatakelola informasi dan data yang berbasis *e-parliament*.

2) Setjen DPR RI harus terus memperbaiki kualitas dukungan kehumasan. Hal ini selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam penataan kehumasan (*Grand Design* Kehumasan).

Tantangan yang melekat kepada Sistem Pendukung DPR RI sebagai sebuah organisasi pendukung parlemen (DPR RI), yaitu:

1. Tuntutan Otonomi Parlemen.

- Menurut *Inter-Parliament Union* (2010), penerapan prinsip-prinsip dari otonomi parlemen menunjukkan perbedaan dalam beberapa aspek, tetapi secara umum dilihat pada *parliamentary responsibility for its own staffing, control over its own budget, dan organisation of its own business*.
- Otonomi parlemen yang terkait dengan *staffing* tersebut diterjemahkan lebih lanjut pada perekrutmen dan manajemen SDM (*recruitment and management of human resources*). Karena itu ke depan Sistem Pendukung DPR RI harus memiliki sistem pengelolaan SDM yang berbeda dengan pemerintah.
- Otonomi parlemen yang terkait dengan anggaran (*budget*) adalah parlemen memiliki keleluasaan dalam menentukan anggarannya. Karena itu ke depan Sistem Pendukung DPR RI harus memiliki sistem pengelolaan Anggaran yang berbeda dengan pemerintah, terutama dalam hal pengajuan anggaran.
- Otonomi parlemen yang terkait dengan organisasi dan tatakelolanya adalah parlemen memiliki keleluasaan untuk menentukan organisasinya (termasuk organisasi pendukung). Karena itu ke depan kelembagaan Sistem Pendukung DPR RI harus berbeda dengan yang berlaku di pemerintah.

2. Adanya reformasi birokrasi. Proses reformasi birokrasi yang akan dan telah dilaksanakan Setjen DPR RI (Sistem Pendukung DPR RI), mengacu sepenuhnya kepada berbagai agenda Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu melaksanakan perubahan pada area:

- 1) Manajemen Perubahan, yaitu bagaimana mengelola perubahan agar reformasi birokrasi di lingkungan Sistem Pendukung DPR RI berjalan sesuai dengan yang ada di dalam *road map*.
- 2) Penataan peraturan perundangan-undangan, yaitu menata kembali segala peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan segala aspek pengelolaan kesekretariatan.
- 3) Penataan dan penguatan organisasi, yaitu restrukturisasi organisasi menuju struktur yang tepat ukuran (*right seizing*).
- 4) Penataan tatalaksana, yaitu pengaturan *internal business process* di dalam organisasi sehingga proses ketatalaksanaan efisien dan efektif.
- 5) Penataan sistem manajemen aparatur, yaitu perbaikan dalam sistem pengelolaan SDM sehingga dapat dihasilkan PNS yang profesional dan sejahtera.
- 6) Penguatan pengawasan, yaitu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan melalui penguatan pengawasan internal.
- 7) Penguatan akuntabilitas kinerja, yaitu peningkatan kinerja organisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu perbaikan pelayanan kepada masyarakat.



TERIMA KASIH